

DEWAN MINTA PEMPROV SERIUS ATENSI TEMUAN BPK MASALAH PENGELOLAAN KEUANGAN RSUD NTB DAN DAK DIKBUD

Mataram (NTBSatu) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menemukan sejumlah permasalahan yang harus Pemprov NTB tindaklanjuti dalam hal pengelolaan keuangan.

Temuan itu terdapat pada sektor kesehatan, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB. Serta, sektor pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.

Atas temuan ini, Anggota Komisi V DPRD NTB, Indra Jaya Usman alias IJU meminta Pemprov NTB untuk memberikan atensi serius terhadap sejumlah permasalahan tersebut.



Anggota Komisi V DPRD NTB, Indra Jaya Usman.
Foto: Muhammad Yamin

“Saya kira wajib menindaklanjuti temuan itu. Di samping itu memang hasil pemeriksaan BPK,” kata IJU di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB, Kamis, 19 Juni 2025.

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, persoalan pengelolaan keuangan pada dua sektor ini sudah menjadi rahasia publik. Apalagi terkait DAK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, sampai ada usulan hak interpelasi dari dewan. Meski akhirnya kandas di tengah jalan.

“Dua isu besar ini selalu menjadi dinamika di Provinsi NTB, entah itu di RSUD atau di pendidikan terkait dengan DAK. Saya kira itu harus sangat serius lah pemerintah daerah mengatensinya,” tegas IJU.

IJU menyampaikan, temuan dari hasil pemeriksaan BPK harus menjadi prioritas Pemda untuk diselesaikan. Lebih khusus Komisi V, yang memang merupakan leading sektor yang membidangi pendidikan dan kesehatan.

“Sama-sama kita memperbaiki situasi, walaupun alhamdulillah kita masih dalam koridor wajar tanpa pengecualian dengan beberapa penekanan perbaikan. Termasuk khususnya di RSUD Provinsi,” tandasnya.

Temuan BPK Sebagai informasi, beberapa permasalahan yang menjadi temuan BPK di antaranya, Pemprov NTB belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Provinsi NTB. Sehingga mengakibatkan utang RSUD Provinsi NTB tahun 2024 senilai Rp247,97 miliar.

“Hal ini menimbulkan defisit operasional dan berpotensi mengalami kesulitan likuiditas di masa mendatang. Yang pada akhirnya dapat mengganggu pelayanan pada masyarakat,” kata Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana.

Sehingga, BPK memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan di RSUD Provinsi NTB.

“Gubernur juga harus merasionalisasikan belanja yang melampaui anggaran dan mengendalikan belanja, dengan memperhatikan kondisi keuangan RSUD Provinsi NTB,” pinta Nyoman Adhi.

Temuan selanjutnya adalah pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) oleh sekolah di lingkungan Pemprov NTB belum memadai.

Termasuk, pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2024 secara swakelola pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB tidak memadai dan tidak sesuai ketentuan.

Selanjutnya, temuan pemeriksaan lainnya senilai Rp4,77 miliar. Temuan ini mencakup kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan senilai Rp3,13 miliar.

Lalu, kelebihan pembayaran atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa seluruhnya senilai Rp1,18 miliar. Selanjutnya, penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran senilai Rp25,00 juta dan dana Bantuan Sosial yang digunakan oleh pihak yang tidak tepat senilai Rp290,00 juta.

Serta, penggunaan dana BOS tidak sesuai ketentuan senilai Rp136,76 Juta.

“Dalam hal ini, BPK merekomendasikan kepada Gubernur NTB agar memproses kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan seluruhnya senilai Rp4,77 miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah,” ungkap Nyoman Adhi.

Jadi Atensi Gubernur NTB

Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan, terhadap dua sektor itu, yaitu RSUD dan Dinas Dikbud NTB menjadi perhatian khusus dalam hal pengelolaan keuangannya. “Ini dua sektor ini akan kita berikan perhatian khusus,” kata Iqbal.

Sementara terkait rekomendasi BPK RI, Iqbal komitmen untuk melaksanakannya sesegera mungkin. Sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

“Sudah ada rekomendasinya sudah lengkap, Pemprov NTB sepenuhnya menerima seluruh rekomendasi, temuan, saran, yang menjadi temuan BPR RI,” pungkas Iqbal. (*)